KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL N0MOR 14 TAHUN 2024 DALAM PENGURUSAN IJIN PENGGUNAAN AIR BAWAH TANAH

Ketut Agus Karmadi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : agus.karmadi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze legal certainty regarding the applicability of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 14 of 2024 in the process of obtaining permits for groundwater use. The research employs a normative juridical approach using primary legal materials, including Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources and Ministerial Regulation Number 14 of 2024, supported by relevant secondary legal literature. The results indicate that this regulation improves the licensing system through integration with the digital OSS platform, enhancing legal certainty and ease of doing business. The regulation simplifies licensing procedures and provides administrative certainty for business actors. Previous regulatory ambiguities, particularly regarding groundwater drilling permits before and after Law Number 6 of 2023, have been addressed through the OSS system. Groundwater use exceeding 100,000 liters per month requires approval from the Minister of Energy and Mineral Resources, while usage below the threshold remains subject to reporting obligations. The regulation strengthens legal certainty, supervisory effectiveness, and sustainable groundwater management.

*Keywords****: Legal Certainty, Legal Validity, Groundwater Use Permit***

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap keberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 dalam pengurusan izin penggunaan air bawah tanah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 memberikan kemajuan dalam sistem perizinan melalui integrasi digital berbasis OSS guna mendukung kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Regulasi ini menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan kepastian administratif bagi pelaku usaha. Ketidakjelasan pengaturan sebelumnya, terutama terkait perizinan sumur bor sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, telah diperbaiki melalui sistem OSS yang terintegrasi. Penggunaan air tanah di atas 100.000 liter per bulan wajib memperoleh persetujuan Menteri ESDM, sedangkan penggunaan di bawah batas tersebut tetap memerlukan pelaporan. Keberadaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 memperkuat kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan keberlanjutan pengelolaan air bawah tanah.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keberlakuan hukum, Ijin Air Bawah Tanah